

ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOGOR

Analysis of Budget Absorption for the Public Works and Spatial Planning Department of Bogor Regency

Tatu Rizkia¹, Dedi Budiman Hakim², A Faroby Falatehan³

¹ Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

² Departemen Ilmu Ekonomi, Institut Pertanian Bogor

³ Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor

ABSTRACT

Budget expenditure is the government's spending to finance all programs and activities that directly or indirectly impact public basic services. The amount of direct budget expenditure managed by the Department of Public Works and Spatial Planning (DPUPR) of Bogor Regency is not in line with the percentage of actual direct budget expenditure realization. Based on the Budget Realization Report (LRA) of Regional Apparatus Work Units (SKPD) in the Bogor Regency, over a five-year period (2014-2018), the average budget realization was 90.73%. Meanwhile, the DPUPR of Bogor Regency had the lowest budget realization percentage, which was 75.01%. Based on this condition, the purpose of this research is to formulate a strategy for optimizing the realization of direct budget expenditure at the DPUPR of Bogor Regency using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. The initial phase of this research involves understanding the disbursement of budget expenditure in the Department of Public Works and Spatial Planning of Bogor Regency through descriptive analysis. The research results show that the percentage of direct budget expenditure disbursement in the DPUPR of Bogor Regency is the lowest among SKPDs in the Bogor Regency government. The strategy to optimize the disbursement of direct budget expenditure at the DPUPR of Bogor Regency involves creating highly binding regulations for service providers to ensure administrative compliance (Regulation of the Regent).

Keywords: AHP, Budget Disbursement, Direct Expenditure, Strategy.

ABSTRAK

Anggaran belanja merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk mendanai seluruh program dan kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan dasar publik. Besarnya anggaran belanja langsung yang dikelola oleh DPUPR Kabupaten Bogor tidak sejalan dengan besarnya persentase realisasi anggaran belanja langsung. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Bogor, selama kurun waktu lima tahun (2014-2018) memperoleh rata-rata realisasi anggaran sebesar 90,73%. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor merupakan SKPD yang mempunyai angka realisasi anggaran terendah yaitu 75,01%. Berdasarkan kondisi tersebut, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi optimalisasi penyerapan anggaran belanja langsung pada DPUPR Kabupaten Bogor dengan menggunakan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Tahap awal dari penelitian ini yaitu mengetahui gambaran penyerapan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase penyerapan anggaran belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor merupakan persentase penyerapan anggaran terendah diantara SKPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Strategi untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran belanja langsung pada DPUPR Kabupaten adalah pembuatan regulasi yang sangat mengikat bagi penyedia jasa agar tertib administrasi (Peraturan Bupati).

Kata Kunci: AHP, Belanja Langsung, Penyerapan Anggaran, Strategi

PENDAHULUAN

Anggaran pada sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas dan pengelolaan dana publik dan pelaksanaan

program-program yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran belanja ini merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk mendanai seluruh program dan kegiatan yang

berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan dasar publik. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Mardiasmo 2002).

Penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang sudah direncanakan dan merupakan pekerjaan yang membutuhkan anggaran yang harus diserap. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya DPUPR Kabupaten Bogor memiliki anggaran yang besar persentasenya terhadap APBD Kabupaten Bogor. Rata-rata total anggaran belanja langsung bagi 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya di Kabupaten Bogor selama 2014-2018 sebesar Rp3.108.962.686.220 sedangkan DPUPR Kabupaten Bogor memiliki rata-rata anggaran belanja langsung sebesar Rp903.484.422.800 per tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase rata-rata anggaran belanja langsung yang dimiliki DPUPR Kabupaten Bogor sebesar 29,06% dari APBD terhadap 32 SKPD lainnya. Informasi tersebut diperoleh berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD Kabupaten Bogor yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

Berdasarkan data BPKAD (2014-2017) dan LKPj Bupati Bogor (2018), persentase penyerapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor sebesar 75,01% angka tersebut merupakan persentase penyerapan anggaran terendah diantara seluruh SKPD Kabupaten Bogor. Berdasarkan LRA SKPD Kabupaten Bogor, selama kurun waktu lima tahun (2014-2018) seluruh SKPD yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor memperoleh rata-rata realisasi anggaran sebesar 90,73%.

Kegagalan dalam penyerapan APBD akan mengakibatkan alokasi dana yang tidak dapat dimanfaatkan secara efektif. Mengingat fungsi anggaran sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, maka satuan kerja yang berperan sebagai pengelola anggaran harus mampu mengelola anggaran secara

optimal (Fahlevi dan Ananta 2015). Sebagai salah satu pengelola anggaran publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor DPUPR Kabupaten Bogor harus memperbaiki kinerja penyerapan anggaran agar lebih optimal, sehingga diperlukan perumusan strategi dalam optimalisasi penyerapan anggaran belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor. Waktu penelitian ini dilakukan pada Mei 2019 - Agustus 2019.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder terdiri dari dokumen Laporan Realisasi Anggaran di Pemerintah Kabupaten Bogor, Laporan Realisasi Anggaran SKPD Kabupaten Bogor berasal dari BPKAD Kabupaten Bogor, Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor serta data-data sekunder pendukung lainnya. Sumber data primer adalah informan dari SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor. Subjek dalam penelitian ini adalah pejabat struktural maupun pejabat fungsional umum yang terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.

Prosedur Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Hal ini bertujuan agar mendapatkan hasil yang komprehensif dan dapat memberikan dampak yang positif bila diaplikasikan oleh pengambil kebijakan. Analisis deskriptif dipilih dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang dan pernah berlangsung, akibat atau dampak yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor

Berdasarkan informasi pada Tabel 1 persentase penyerapan anggaran tertinggi terjadi di tahun 2014, dengan persentase

realisasi penyerapan anggaran sebesar 84,90%. Dalam rentang waktu 5 tahun persentase penyerapan anggaran terendah terjadi di tahun 2015, persentase realisasi penyerapan anggaran hanya sebesar 64,03%. Rata-rata persentase penyerapan anggaran belanja dalam kurun waktu 2014-2018 yakni sebesar 75,79%.

Tabel 1. Realisasi anggaran belanja (Dinas Bina Marga dan Pengairan-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor 2014-2018)

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Lebih (Rp)
2014	850.228.246.000	721.842.092.856	84,90	128.386.153.144
2015	986.275.415.000	631.540.570.739	64,03	354.734.844.261
2016	968.714.246.000	795.885.298.229	82,16	172.828.947.771
2017	1.016.550.840.000	775.909.981.145	76,33	240.640.858.855
2018	861.088.519.000	616.002.785.653	71,54	245.085.733.347
Rataan	936.571.453.200	708.236.145.724	75,79	228.335.307.475

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan DPUPR Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2014-2018

Data realisasi belanja langsung yang tertera pada Tabel 2 terlihat bahwa anggaran belanja langsung DBMP-DPUPR mengalami perubahan jumlah anggaran. Selama kurun waktu 5 tahun (2014-2018) terjadi penambahan maupun pengurangan alokasi anggaran belanja langsung dari tahun ke tahun. Persentase penyerapan anggaran belanja langsung tertinggi selama periode 2014-2018

terjadi pada tahun 2014 dengan persentase sebesar 84,61% dengan sisa penyerapan anggaran Rp127.486.267.127. Penurunan realisasi penyerapan anggaran belanja langsung yang cukup drastis terjadi pada tahun 2015 dengan persentase penyerapan anggaran belanja langsung hanya sebesar 63,35% dengan sisa penyerapan anggaran yang relatif tinggi sebesar Rp352.280.657.998.

Tabel 2. Realisasi anggaran belanja langsung SKPD (Dinas Bina Marga dan Pengairan-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor 2014-2018)

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Lebih (Rp)
2014	828.515.881.000	701.029.613.873	84,61	127.486.267.127
2015	961.372.420.000	609.091.762.002	63,35	352.280.657.998
2016	940.150.302.000	767.798.234.922	81,66	172.352.067.078
2017	986.379.210.000	746.587.544.777	75,68	239.791.665.223
2018	801.004.301.000	558.608.887.939	69,74	242.395.413.061
Rataan	903.484.422.800	676.623.208.702	75,01	226.861.214.097

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan DPUPR Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2014-2018

Proporsi belanja pegawai pada anggaran belanja langsung sebesar 1,41%, belanja barang dan jasa sebesar 18,95% dan belanja modal mencapai 79,64%. Besarnya proporsi belanja modal merupakan upaya dalam melaksanakan fungsi pelayanan yang harus dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana wilayah, dengan fokus

kebijakan peningkatan infrastruktur dalam rangka pengembangan wilayah, peningkatan infrastruktur dalam rangka pengembangan sektor-sektor unggulan daerah, serta peningkatan sarana dan prasarana ruang publik. Rincian rata-rata alokasi anggaran belanja langsung DBMP-DPUPR tersaji pada Tabel 3.



Tabel 3. Rincian rata-rata anggaran belanja langsung Dinas Bina Marga dan Pengairan-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor 2014-2018

No.	Jenis Belanja	Rata-rata Anggaran (Rp)	Proporsi Jenis Belanja (%)
1.	Belanja Pegawai	12,76 Milyar	1,41
2.	Belanja Barang/Jasa	171,22 Milyar	18,95
3.	Belanja Modal	719,49 Milyar	79,64
Jumlah		903,7 Milyar	100

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan DPUPR Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2014-2018

Penyerapan anggaran belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor memiliki karakteristik terjadi penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun anggaran berjalan. Informasi yang tercantum pada Tabel 4 selama

lima tahun, rata-rata penyerapan anggaran terkonsentrasi di triwulan akhir sebesar 54,17%. Penyerapan anggaran yang tidak proporsional menyebabkan beban kerja yang tidak wajar diakhir tahun dan kecenderungan rendahnya kualitas *output*.

Tabel 4. Persentase penyerapan anggaran belanja langsung Dinas Bina Marga dan Pengairan-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor per triwulan tahun 2014-2018

Tahun	Triwulan I (%)	Triwulan II (%)	Triwulan III (%)	Triwulan IV (%)
2014 (DBMP)	3,20	8,80	17,70	54,80
2015 (DBMP)	0,10	3,30	10,00	49,90
2016 (DBMP)	0,40	6,70	11,90	62,50
2017 (DPUPR)	1,60	5,00	9,60	59,50
2018 (DPUPR)	2,90	11,50	11,30	44,00
Rata-rata	1,65	7,07	12,12	54,17

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan DPUPR Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2014-2018

Berdasarkan Tabel 4, persentase penyerapan anggaran selama lima tahun yang direalisasikan DBMP Kabupaten Bogor pada tahun anggaran 2014-2016 dan DPUPR Kabupaten Bogor pada tahun anggaran 2017-2018. Triwulan IV (empat) pada tahun 2016 merupakan periode dengan lonjakan penyerapan anggaran tertinggi yang mencapai 62,50%.

Hal berbeda terjadi pada realisasi penyerapan anggaran belanja tidak langsung pada tahun anggaran 2014-2018. Persentase realisasi mencapai angka lebih dari 90% setiap tahunnya. Rincian realisasi penyerapan anggaran belanja tidak langsung dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Realisasi anggaran belanja tidak langsung SKPD (Dinas Bina Marga dan Pengairan-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor 2014-2018)

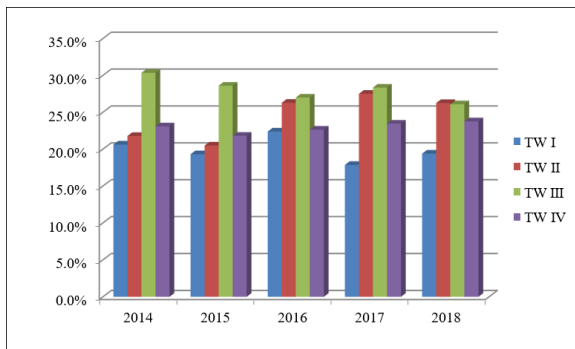
Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Lebih (Rp)
2014	21.712.365.000	20.812.478.983	95,86	899.886.017
2015	24.902.995.000	22.448.808.737	90,15	2.454.186.263
2016	28.563.944.000	28.087.063.307	98,33	476.880.693
2017	30.171.630.000	29.322.436.368	97,19	849.193.632
2018	60.084.218.000	57.393.897.714	95,52	2.690.320.286
Rataan	33.087.030.400	31.612.937.022	95,41	1.474.093.378

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan DPUPR Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2014-2018

Berdasarkan Tabel 5 diketahui dalam kurun waktu tahun 2014-2018 persentase realisasi anggaran selalu melebihi angka 90% dengan rata-rata sebesar 95,41%. Hal tersebut menggambarkan bahwa tidak ada kendala serius dalam pencapaian penyerapan anggaran belanja tidak langsung pada Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor. Pola penyerapan anggaran belanja langsung tidak terkonsentrasi pada triwulan IV melainkan penyerapan terdistribusi pada triwulan I, II dan III. Rata-rata penyerapan anggaran pada triwulan satu sudah mencapai

19,90%. Pola penyerapan anggaran belanja langsung dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan DPUPR Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2014-2018

Gambar 1. Pola Penyerapan Anggaran Belanja Tidak Langsung DBMP-DPUPR Kabupaten Bogor per Triwulan Tahun 2014-2018

Strategi Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor

Pemilihan strategi dengan metode AHP menjelaskan aspek yang mempengaruhi pemilihan strategi optimalisasi penyerapan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor adalah sumber daya manusia, regulasi serta pengadaan barang dan jasa. Aspek tersebut merupakan hasil penelitian dengan metode skala likert yang dilakukan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.

Pihak adalah pelaku utama yang mempengaruhi pemilihan strategi agar penyerapan anggaran dapat optimal. Pihak tersebut adalah DPUPR Kabupaten Bogor, Bupati serta penyedia jasa. Dalam hal ini pihak DPUPR Kab. Bogor serta penyedia jasa memperoleh penilaian yang berimbang sebesar 0,47. Hal ini menunjukkan penyerapan

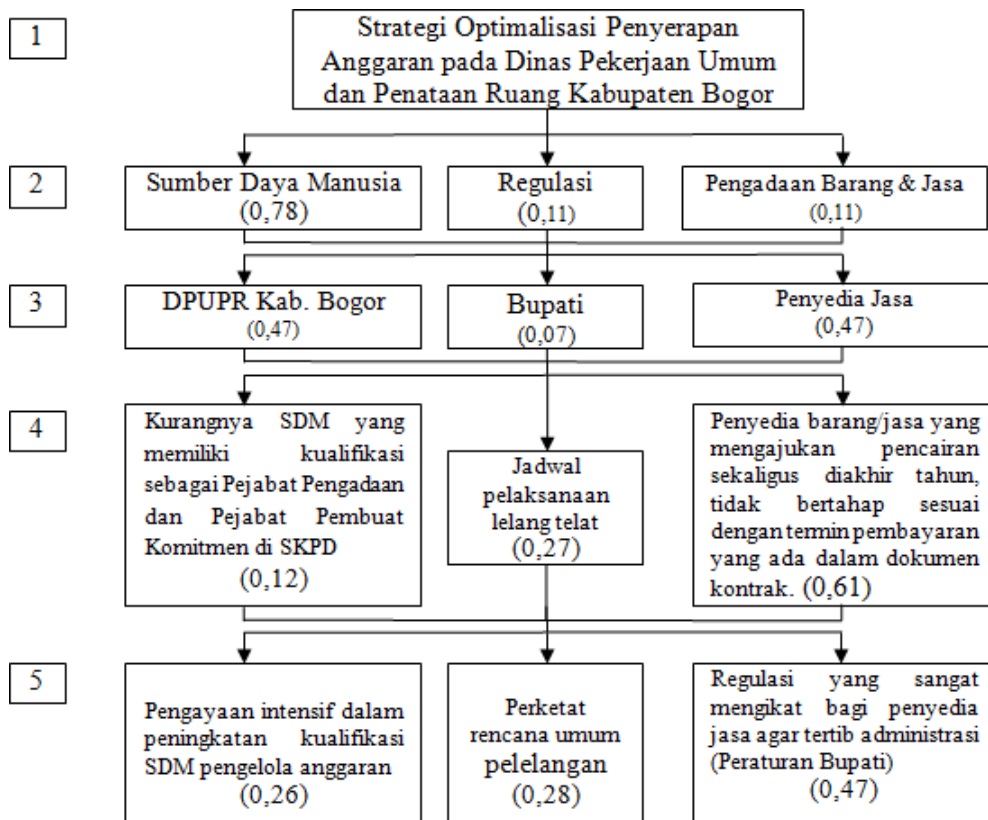
anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor sangat dipengaruhi oleh sumberdaya dari pihak internal DPUPR dan penyedia jasa dalam melakukan penarikan tagihan.

Kendala adalah permasalahan utama yang menyebabkan persentase penyerapan anggaran DPUPR Kabupaten Bogor kurang optimal. Penyedia barang/jasa yang mengajukan pencairan sekaligus diakhir tahun, tidak bertahap sesuai dengan termin pembayaran yang ada dalam dokumen kontrak. Pernyataan tersebut merupakan kendala utama yang dipilih oleh responden dengan hasil penilaian 0,61. Hal tersebut mengindikasikan kendala tersebut merupakan permasalahan yang memberikan pengaruh besar terhadap optimalisasi penyerapan anggaran.

Tanggapan para informan terhadap alternatif strategi yang ditawarkan mengarah pada pemilihan strategi untuk ditetapkan regulasi yang sangat mengikat bagi penyedia jasa agar tertib administrasi (Peraturan Bupati). Strategi ini mendapat dukungan terbesar dari para responden dengan mencapai nilai 0,47. Sehingga strategi ini merupakan prioritas pertama untuk direkomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Bogor dalam upaya optimalisasi penyerapan anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.

Perumusan strategi optimalisasi penyerapan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process*. Dalam metode AHP disusun struktur hierarki yang mencakup level fokus yaitu tujuan yang diharapkan dapat tercapai melalui beberapa alternatif strategi yang telah diprioritaskan seperti tampak pada Gambar 2.





Sumber: Pengolahan Data Primer (2019)

Gambar 2. Hasil Penelitian AHP untuk Strategi Optimalisasi Penyerapan Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor

Keterangan:

- 1 = Tujuan yang ingin dicapai
- 2 = Aspek yang mempengaruhi pemilihan strategi
- 3 = Pihak yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan

- 4 = Kendala-kendala yang dihadapi
- 5 = Alternatif-alternatif strategi

Rancangan Program dan Kegiatan

Pencapaian sasaran optimalisasi penyerapan anggaran dapat terwujud bila strategi yang dirumuskan mampu direalisasikan dengan program maupun kegiatan yang bertahap. Rancangan program dan kegiatan bersifat dapat dilakukan sendiri

oleh DPUPR Kabupaten Bogor maupun kegiatan dalam bentuk peningkatan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dengan permasalahan penyerapan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor. Uraian tersebut disajikan lebih rinci dalam Tabel 6.

Tael 6. Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Pihak yang terlibat
Regulasi yang sangat mengikat bagi penyedia jasa agar tertib administrasi (Peraturan Bupati)	Kepala daerah mampu tanggap sertaturut andil dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam lingkup satuan kerja dalampemerintah daerah dibawah kepemimpinannya	Penguatan koordinasi serta penyusunan regulasi (Peraturan Bupati) yang tepat guna untuk mencapai tujuan yang dimaksud	Pembuatan Regulasi baru	Bupati Sekretariat Daerah Dinas terkait (DPUPR)
Perketat rencana umum pevelangan	Efektifitas seluruh proses pelaksanaan kegiatan	Peningkatan kinerja internal perangkat kerja daerah serta koordinasi <i>stakeholder</i> terkait	Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan seluruh proses kegiatan	DPUPR BPKAD BAPEDDA DISPENDA SETDA DPRD
Pengayaan intensif dalam peningkatan kualifikasi SDM pengelola anggaran	Optimalisasi <i>outcome</i> dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan pelatihan/diklat	Peningkatan dan pemerataan kapasitas SDM pengelola anggaran	Diklat teknis	Dinas terkait (DPUPR)

Sumber: Data primer (2019), diolah

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Persentase penyerapan anggaran belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor merupakan persentase penyerapan anggaran terendah diantara SKPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Strategi yang terpilih untuk optimalisasi penyerapan anggaran belanja langsung pada DPUPR Kabupaten Bogor berdasarkan metode AHP adalah dibuatnya regulasi yang sangat mengikat bagi penyedia jasa agar tertib administrasi (Peraturan Bupati).

Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor. Strategi yang terpilih hendaknya dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor umumnya dan secara khusus dapat diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor. Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang terbatas pada SKPD DPUPR Kabupaten Bogor, saran untuk penelitian selanjutnya dapat difokuskan bagi SKPD lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

[BPKAD] Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor. 2018. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2014-2018. Bogor. (ID): BPKAD.

[DPUPR] Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor. 2019. Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2014-2019. Bogor (ID): DPUPR.

Fahlevi H, Ananta MR. 2015. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja Langsung-Studi pada SKPD di Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*. 1(2):37-44.

Mardiasmo. 2002. Akutansi Sektor Publik. Yogyakarta (ID): ANDI.

Suhartono. 2011. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara yang Efektif dan Efisien dan Akuntabel). [Tesis]. Jakarta (ID): Universitas Indonesia.

